PENGADILAN NEGERI SERANG

LAPORAN KEUANGAN

TRIWULAN III TAHUN 2021

Untuk Periode yang Berakhir 30 September Tahun 2021

JL. RAYA SERANG PANDEGLANG KM. 6

SERANG - Banten

Telp. 0254-7914503 Fax. 0254-7914504

LAPORAN KEUANGAN
TRIWULAN III TAHUN 2021
PENGADILAN NEGERI SERANG
097560

Untuk Periode yang Berakhir 30 September 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. RAYA SERANG PANDEGLANG KM.6
Telp. 0254-7914503 Fax. 0254-7914504
SERANG - Banten 42126
e-mail : pnserang12@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Serang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupaLaporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021 Pengadilan Negeri Serang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021 Pengadilan Negeri Serang ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Serang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 8 Oktober 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,

GEMPA ANDEYSETIO, ST.
NIP.19751221 200604 1 005

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Pernyataan Tanggung Jawab iii
Ringkasan 10
I. Laporan Realisasi Anggaran 14
II. Neraca 16
III. Laporan Operasional 18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas 19
V. Catatan atas Laporan Keuangan 21
A. Penjelasan Umum 21
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Serang 21
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 22
A.3. Basis Akuntansi 22
A.4. Dasar Pengukuran 22
A.5. Kebijakan Akuntansi 23
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran 31
B.1. Pendapatan 31
B.2. Belanja 32
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 38
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran 38
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan 38
C.3. Persediaan 39
C.4. Tanah 39
C.5. Peralatan dan Mesin 40
C.6. Gedung dan Bangunan 41
C.7. Jalan, Irigasi dan Bangunan 42
C.8. Aset Tetap Lainnya 43
C.9. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 43

C.10. Aset Tak Berwujud 44
C.11. Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Tetap Lainnya 45
C.12. Hibah yang Belum Disahkan ..... **Error! Bookmark not defined.**
C.13. Uang Muka dari KPPN 45
C.14. Utang Kepada Pihak Ketiga 45
C.15. Pendapatan Diterima Dimuka 46
C.16. Ekuitas 46
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 47
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak 47
D.2. Beban Pegawai 48
D.3. Beban Persediaan 49
D.4. Beban Barang dan Jasa 49
D.5. Beban Pemeliharaan 50
D.6. Beban Perjalanan Dinas 50
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi 51
D.8. Kegiatan Non Operasional 52
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 52
E.1. Ekuitas Awal 52
E.2. Surplus (defisit) LO 52
E.3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 52
E.4. Transaksi Antar Entitas 53
E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) 53
E.5. Ekuitas Akhir 54
F. Pengungkapan Penting Lainnya 55
F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca 55
F.2. Pengungkapan Lain-lain 55
Laporan-laporan Pendukung 57
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap 58
Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual 60

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Serang

JL. RAYA SERANG PANDEGLANG KM. 6. SERANG - Banten 42126

Telp. 0254-7914503 Fax. 0254-7914504 e-mail : pnserang12@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021 Pengadilan Negeri Serang yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 September Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021 Pengadilan Negeri Serang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 8 Oktober 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

GEMPA ANDEYSETIO, ST.
NIP.19751221 200604 1 005

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021 Pengadilan Negeri Serang ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2021 s.d. 30 September 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp44.232.920 atau mencapai 307,17 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp14.400.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp13.468.139.714 atau mencapai 71,85 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp18.745.326.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 September 2021 dan per 31 Desember 2020.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Aset per 30 September 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp53.761.838.342 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp46.693.435.000; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp53.715.144.907 Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp42.000.000 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp42.000.000 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp53.719.838.342.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2021 adalah sebesar Rp46.316.753, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp13.481.403.174 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp13.435.086.421). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0 dan surplus(defisit) sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp13.435.086.421).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp53.430.127.969 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp13.435.086.421) kemudian ditambah dengan Selisih Revaluasi Aset Tetap senilai Rp0 ditambah Koreksi Lain-Lain senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp13.724.796.794 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2021 adalah senilai Rp53.719.838.342.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan

oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode per 30 September 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI SERANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2021
DAN 30 SEPTEMBER 2020
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2021			TA 2020
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	14.400.000	44.232.920	307,17	24.302.744
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		14.400.000	44.232.920	307,17	24.302.744
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	15.144.096.000	11.061.971.611	73,04	11.335.946.717
2.	Belanja Barang	B.2.2.	2.844.686.000	1.727.596.053	60,73	2.045.263.233
3.	Belanja Modal	B.2.3.	756.544.000	678.572.050	97,73	271.716.000
	Jumlah Belanja Negara		18.745.326.000	13.468.139.714	71,85	13.652.925.950

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI SERANG
NERACA
PER 30 SEPTEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan		30 SEPTEMBER 2021	31 DESEMBER 2020
ASET				
Aset Lancar	C.1			
Kas dan Bank				
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	1.	42.000.000	0
Persediaan	C.1	2.	5.693.435	2.898.200
Persediaan yang Belum Diregister	C.1	3.	(1.000.000)	0
Jumlah Aset Lancar			47.244.000	2.898.200
Aset Tetap	C.2			
Tanah	C.2.	1.	25.630.356.000	25.630.356.000
Peralatan dan Mesin	C.2.	2.	8.661.095.433	8.142.650.433
Gedung dan Bangunan	C.2.	3.	28.177.184.985	27.716.357.935
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.	4.	921.731.000	921.731.000
Aset Tetap Lainnya	C.2.	5.	12330.462	12.140.462
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.	6.	(9.687.552.973)	(8.943.855.517)
Jumlah Aset Tetap			53.715.144.907	53.479.380.313
Aset Lainnya	C.4			
Aset tak Berwujud	C.4.	1.	4.994.000	4.994.000
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset	C.4	2.	(4.994.000)	(4.994.000)
Jumlah Aset Lainnya			0	0
Jumlah Aset			53.761.838.342	53.482.278.513
KEWAJIBAN				
Kewajiban Jangka Pendek	C.5			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5.	1.	0	50.066.711
Pendapatan diterima dimuka	C.5	2.	0	2.083.833
Uang Muka dari KPPN	C.5	3.	42.000.000	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			42.000.000	52.150.544
Jumlah Kewajiban			42.000.000	52.150.544
EKUITAS				
Ekuitas	C.6		53.719.838.342	53.430.127.969
Jumlah Ekuitas			53.719.838.342	53.430.127.969
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas			53.761.838.342	53.482.278.513

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI SERANG
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 SEPTEMBER 2021 DAN 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2021	2020
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	**D.1**	**46.316.753**	**38.889.465**
Jumlah Pendapatan		**46.316.753**	**38.889.465**
Beban			
Beban Pegawai	**D. 2**	**11.038.836.679**	**11.335.424.837**
Beban Persediaan	**D. 3**	**76.770.015**	**72.606.500**
Beban Barang dan Jasa	**D. 4**	**1.130.998.709**	**1.241.222.196**
Beban Pemeliharaan	**D. 5**	**484.990.315**	**731.103.820**
Beban Perjalanan DInas	**D. 6**	**6.110.000**	**21.700.000**
Beban Penyusutan dan Amortisasi	**D. 9**	**743.697.456**	**779.030.958**
Jumlah Beban		**13.481.403.174**	**14.181.088.311**
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		**(13.435.086.421)**	**(14.142.198.846)**
Kegiatan Non Operasional Lainnya	**D. 11**	**0**	**255.920.112**
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	**D. 12**	**0**	**246.500**
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		**0**	**255.673.612**
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		**(13.435.086.421)**	**(13.886.525.234)**
Pos Luar Biasa	**D. 13**	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		**(13.435.086.421)**	**(13.886.525.234)**

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI SERANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
per 30 September 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2021	2020
Ekuitas Awal	E. 1	53.430.127969	54.318.928.651
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(13.435.086.421)	(13.886.525.234)
Ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.2	0	0
Koreksi atas Reklasifikasi	E. 3.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset	E. 3.4	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.5	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.6	0	0
Jumlah		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	13.724.796.794	13.628.623.206
Kenaikan/penurunan ekuitas		(289.710.373)	(257.902.028)
Ekuitas Akhir		53.719.838.342	54.061.026.623

Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Serang

Pengadilan Negeri Serang didirikan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. Organisasi dan tata kerja Pengadilan Negeri Serang diatur dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum. Pengadilan Negeri Serang terletak di Jalan Raya Serang Pandeglang KM. 6 Serang.

Visi Pengadilan Negeri Serang adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tipikor Serang Kelas IA Serang yang Agung.

Misi Pengadilan Negeri Serang adalah

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tipikor Serang Kelas IA
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tipikor Serang Kelas IA
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial / Tipikor Serang Kelas IA

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Serang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Serang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melaui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Serang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Serang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Serang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Serang adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

  a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

  b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	**Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo**	**0.5%**
Kurang Lancar	**Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan**	**10%**
Diragukan	**Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan**	**50%**
Macet	**1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan** **2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN**	**100%**

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan

sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap asset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan,

dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementrian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah asset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan, Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek selain Tanah.

- Nilai asset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai asset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun apabila nilai asset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Asset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Asset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saatada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan

penyusutan aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  1. Tanah
  2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	**2 s.d. 20 tahun**
Gedung dan Bangunan	**10 s.d. 50 tahun**
Jalan, Irigasi dan Jaringan	**5 s.d. 40 tahun**
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	**4 tahun**

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Anggaran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, asset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dank as yang dibatasi penggunaannya. KM.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa asset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

  a. Kewajiban Jangka Pendek

  Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

  Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

  b. Kewajiban Jangka Panjang

  Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Negeri Serang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi DIPA berupa revisi Halaman III DIPA updating rencana penarikan dan penerimaan yang tidak mengakibatkan perubahan jumlah pagu anggaran dipa. Revisi DIPA pada Pengadilan Negeri Serang mempengaruhi jumlah pagu dipa. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

URAIAN	2021	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	14.400.000	14.400.000
Jumlah Pendapatan	**14.400.000**	**14.400.000**
Belanja		
Belanja Pegawai	15.144.096.000	15.144.096.000
Belanja Barang	2.844.686.000	2.844.686.000
Belanja Modal	756.544.000	756.544.000
Jumlah Belanja	**18.745.326.000**	**18.745.326.000**

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Rp. 44.232.920

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 adalah sebesar Rp44.232.920 atau mencapai 307,17 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp14.400.000. Pendapatan Pengadilan Negeri Serang terdiri dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan dan Penerimaan kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP

No.	Uraian	2021		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	14.400.000	44.232.920	304,17
	Total Pendapatan	14.400.000	44.232.920	304,17

Realisasi pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan per 30 September 2021 mengalami peningkatan sebesar 82,00 persen dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan karena terdapat penerimaan sewa kantin pada tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2021 dan TA 2020

No.	Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	44.232.920	11.743.182	276,67
2.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	2.694.450	0
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	112	0
4.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	9.865.000	0
	Total Pendapatan	44.232.920	24.302.744	82,00

Pandemi COVID-19 tidak berpengaruh terhadap penerimaan negara bukan pajak pada Pengadilan Negeri Serang baik kepada estimasi penerimaan maupun dengan realisasi penerimaannya, hal ini dikarenakan sumber pendapatan Pengadilan Negeri Serang yang utama untuk DIPA Badan Urusan Administrasi adalah Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan berupa sewa rumah dinas yang diperuntukkan bagi Hakim pada Pengadilan Negeri Serang dengan cara pemungutan serta penyetoran ke kas Negara melalui potongan dalam surat perintah membayar (SPM) Gaji Induk.

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Negara : Rp13.468.140.372

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Serang per 30 September 2021 adalah sebesar Rp13.468.140.372 atau sebesar 71,85 persen dari anggaran senilai Rp.18.472.326.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 September 2021 adalah sebagai berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September 2021

Uraian	2021		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	15.144.096.000	11.061.972.269	73,04
Belanja Barang	2.844.686.000	1.727.596.053	60,73
Belanja Modal	756.544.000	678.572.020	89,69
Total Belanja Bruto	18.745.326.000	13.468.140.372	71,85
Pengembalian Belanja	0	658	0
Total Belanja Netto	18.745.326.000	13.468.139.714	71,85

Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja per 30 September 2021 mengalami penurunan sebesar (1,35) persen. Hal ini disebabkan antara lain realisasi pembayaran belanja pegawai gaji ke 14 hanya gaji pokok saja dan adanya penurunan belanja barang dari kegiatan perjalanan dinas yang merupakan dampak dari pandemi Covid-19 dan adanya peraturan PPKM, sehingga koordinasi dilakukan secara daring.

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 September 2021 dan 2020

Uraian	2021	2020	Naik (Turun) %
Belanja Pegawai	11.061.971.611	11.335.946.717	(2,42)
Belanja Barang	1.727.596.053	2.045.263.233	(15,53)
Belanja Modal	678.572.020	271.716.000	2.397,36
Total Belanja	13.468.139.714	13.652.926.556	(1,35)

B.2.1.Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai : Rp11.061.971.611

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Serang per 30 September TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11.061.971.611 dan Rp11.335.946.717. Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai per 30 September 2021 mengalami penurunan sebesar (2,42) persen dari TA 2020, hal ini dikarenakan realisasi pembayaran belanja pegawai gaji ke 14 hanya gaji pokok saja karena anggaran yang ada dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam program peningkatan ekonomi nasional.

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 September TA 2021 dan TA 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	9.348.972.269	6.186.607.076	10,39
Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	1.713.000.000	1.035.000.000	21,45
Total Belanja Brutto	11.061.972.269	7.221.607.076	11,98
Pengembalian Belanja	(658)	(197)	(95,94)
Total Belanja Netto	11.061.971.611	7.221.606.879	11,98

B.2.2.Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang : Rp1.727.596.053

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Serang per 30 September TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.727.596.053 dan Rp2.045.263.233. Realisasi Belanja Barang per 30 September Tahun Anggaran 2021 mengalami penurunan sebesar (15,53) persen dari Realisasi Belanja Barang per 30 September TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain di tahun 2021 menurunnya realisasi belanja perjalanan dinas, belanja langganan jasa, dan belanja pemelihaaraan. Yang tertinggi penurunannya adalah belanja perjalanan dinas, hal ini dikarenakan pada tahun 2021 kebijakan pemerintah terkait penanganan pandemi covid 19 yang membatasi mobilisasi massa dan adanya pemberlakuan PPKM di berbagai daerah sehingga rapat-rapat maupun koordinasi dilakukan secara daring.

Perbandingan Belanja Barang per 30 September TA 2021 dan TA 2020

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik (Turun)
Belanja Barang Operasional	666.231.176	710.232.500	(6,19)
Belanja Jasa	488.099.312	515.469.413	(5,31)
Belanja Pemeliharaan	457.970.315	706.090.820	(35,14)
Belanja Perjalanan Dinas	6.110.000	21.700.000	(71,84)
Belanja Barang Persediaan	105.585.250	91.770.500	15,05
Belanja Barang Non Operasional	3.600.000	0	0
Total Belanja Brutto	1.727.596.053	2.045.263.233	(15,53)
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	1.727.596.053	2.045.263.233	(15,53)

Pengadilan Negeri Serang telah menganggarkan anggaran dalam rangka penanganan COVID 19 sebesar Rp11.250.000,- berupa pengadaan APD/Alat Uji Medis/Rapid Test, Cairan Disinfektan, Masker dan Handsanitizer, sampai dengan

30 September 2021 anggaran tersebut yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp6.905.000,-. Terkait penanganan COVID 19 berupa penyemprotan pelaksanaannya masih bekerjasama dengan BPBD provinsi Banten begitu juga dengan kegiatan Swab PCR Pengadilan Negeri Serang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang diberikan secara gratis. Belanja penanganan pandemi covid 19 yang terealisasi sampai dengan 30 September 2021 berupa :

1. Handsanitizer sebanyak 65 botol @500 ml.
2. Handsanitizer sebanyak 6 botol @1.000 ml.
3. Masker sebanyak 500 buah.

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal :Rp678.572.050

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Serang TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp678.572.050 dan Rp271.716.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal per 30 September Tahun Anggaran 2021 mengalami kenaikan sebesar 149,73 persen dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan anggaran belanja modal tahun 2021 sampai dengan 30 September 2021 telah direalisasikan 89 persen dengan output yang dicapai 100 persen adalah sebanyak 5 output, jika dibandingkan dengan anggaran belanja tahun sebelumnya terdapat peningkatan anggaran belanja modal pada tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan & Mesin	217.745.000	25.000.000	770,98
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	460.827.050	246.716.000	86,78
Total Belanja Brutto	**678.572.050**	**271.716.000**	**149,73**
Pengembalian Belanja	**0**	**0**	**0**
Total Belanja Netto	**678.572.050**	**271.716.000**	**149,73**

B.2.3.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin :Rp217.745.000

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 adalah sebesar Rp217.745.000, mengalami peningkatan sebesar 770,98 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp25.000.000. Meningkatnya realisasi belanja modal peralatan dan mesin dikarenakan adanya fokus pengadaan yang berkaitan dengan peningkatan layanan kepada Pengguna Disabilitas dan pengguna layanan Tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Serang.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik (Turun)%
PC	0	25.000.000	0
Mesin Antrian Sidang	0	0	
Ruang Sidang Online	197.835.000	0	
Sarana Disabilitas	19.910.000	0	
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian	0	0	0
Jumlah Belanja	217.745.000	25.000.000	0

B.2.3.2 Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan :Rp460.827.500

Realisasi Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan TA 2021 dan TA 2020 masing-masing sebesar Rp460.827.500 dan Rp246.716.000. Realisasi belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan TA 2021 mengalami peningkatan sebesar 86,78 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini pada tahun 2021 belanja modal sudah terealisasi dan output yang dicapai sudah mencapai 75 persen atau 3 output sudah dicapai dari target sebanyak 4 output, sedangkan tahun sebelumnya kegiatan rehab rumah dinas masih proses pelaksanaan kegiatan dan output belum dicapai 100 persen.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik (Turun)%
Penambahan Daya Listrik	54.807.500	0	0,00
Prasarana Disabilitas	29.996.000	0	0,00
Renovasi Ruang Arsip	183.382.750	0	0,00
Renovasi Pintu Kaca	192.640.800	0	0,00
Rehab Rumah Dinas	0	246.716.000	0,00
Jumlah Belanja Kotor	460.827.500	246.716.000	0,00
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	**460.827.500**	**246.716.000**	**0**,00

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Kas di Bendahara Pengeluaran: Rp42.000.000

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp42.000.000 dan Rp0, kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 TA 2021 dan per 31 Desember 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020
Uang Tunai di Brankas	**36.714.350**	**0**
Uang di Bank	**0**	**0**
Kuitansi yang belum di SPM GUkan	**5.285.650**	**0**
Selisih Pembulatan	**0**	**0**
Jumlah	**42.000.000**	**0**

Kas i Bendahara Penerimaan: Rp0

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 September TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 30 September TA 2021 dan per 31 Desember 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020
Uang Tunai di Brankas	**0**	**0**
Uang di Bank	**0**	**0**
Selisih Pembulatan	**0**	**0**
Jumlah	**0**	**0**

Persediaan: Rp5.593.435

C.3. Persediaan

Persediaan per 30 September TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp5.693.435 dan Rp2.898.200. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 September TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020
Barang Konsumsi	**4.2881.435**	**2.381.200**
Bahan Untuk Pemeliharaan	**812.000**	**517.000**
Total	**5.593.435**	**2.898.200**

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Pengadilan Negeri Serang melakukan pembelian persediaan dalam rangka penanganan pencegahan dan penanganan pandemi COVID 19 berupa handsanitizer dan masker, dan sampai 30 September 2021 persediaan untuk kedua jenis belanja barang persediaan tersebut telah habis dipakai.

Persediaan yang Belum Diregister.(Rp1 .000.000)

C.4. Persediaan yang Belum Diregister

Persediaan yang Belum Diregister per 30 September TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020 masing-masing adalah sebesar (Rp1.000.000) dan Rp0. Saldo persediaan yang belum di register muncul pada pelaporan per 30 September 2021 dikarenakan terdapat belanja barang persediaan berupa materai yang belum di Ganti Uang Persediaan ke KPPN.

Tanah :Rp25.630.356. 000

C.5. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Serang per 30 September TA 2021 dan per 31 Desember TA 2020 masing-masing adalah sebesar Rp25.630.356.000 dan Rp25.630.356.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	**25.630.356.000**
Mutasi Tambah	
Pembelian	**0**
Selisih Revaluasi Aset	**0**
Transfer/Reklasifikasi Masuk	**0**
Mutasi Kurang	
Penghapusan	**0**
Transfer/Reklasifikasi Keluar	**0**
Saldo per 30 Juni 2021	**25.630.356.000**

Rincian saldo tanah per 30 September 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Luas (m²)	Lokasi	Jumlah
1.	1.250	Tanah Rumah Dinas Jl. Trip Jamaksari	6.580.500.000
2.	194	Tanah Rumah Dinas Jl. Cipocok Jaya	1.310.043.000
3.	905	Tanah Rumah Dinas Jl. KH. Sochari	5.809.376.000
4.	542	Tanah Rumah Dinas Jl. KH. Fatah Hasan Serang	3.595.194.000
5.	3.325	Tanah Kantor Baru Jl. Raya Serang Pandeglang KM. 6 Serang	8.335.243.000
Jumlah			25.630.356.000

Peralatan dan Mesin Rp8.661.095.433

C.6. Peralatan dan Mesin

Saldo asset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 September 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah Rp8.661.095.433 dan Rp8.142.650.433. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	8.142.650.433
Mutasi Tambah	
Transfer Masuk	0
Reklasifikasi Masuk	0
Hibah	300.700.000
Perolehan lainnya	0
Pembelian	217.745.000
Mutasi Kurang	0
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 30 Juni 2021	**8.661.095.433**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	**(6.913.093.441)**
Nilai Buku per 30 Juni 2021	**1.748.001.992**

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin adalah hibah langsung dari bank BTN berupa :

1. Lemari Es sebanyak 1 unit.
2. Kasur sebanyak 1 unit.
3. AC Split 1 PK sebanyak 1 unit.
4. AC Split 2 PK sebanyak 1 unit.
5. Meja Podium sebanyak 1 unit.
6. Televisi sebanyak 1 unit.
7. Lambang Instansi sebanyak 1 unit.
8. PC All in One sebanyak 5 unit.
9. Lemari Kayu sebanyak 1 unit.
10. Printer warna sebanyak 1 unit.
11. Scanner sebanyak 3 unit.
12. Lemari Besi sebanyak 5 unit.
13. Meja Kayu PTSP sebanyak 10 unit.
14. Backdrop PTSP 1 set.
15. Running Text sebanyak 1 unit.

Penambahan peralatan dan mesin dari pembelian adalah sebagai berikut :

1. Sarana disabilitas 1 paket.
2. Ruang sidang online 1 paket.

Gedung dan Bangunan Rp 28.177.184.985

C.7. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 September 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp28.177.184.985 dan Rp27.716.357.935,-

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2020	**27.716.357.935**
Mutasi Tambah	
Belanja Modal penambahan nilai	**460.827.050**
Koreksi Pencatatan	**0**
Hibah	**0**
Mutasi Kurang	**0**
Revaluasi Aset	**0**
Koreksi Pencatatan	**0**
Reklasifikasi Keluar	**0**
Saldo per 30 Juni 2021	**28.177.184.985**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	**(2.581.272.494)**
Nilai Buku 30 Juni 2021	**25.595.912.491**

Rincian asset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, irigasi dan Bangunan :Rp921.731.000

C.8. Jalan, Irigasi dan Bangunan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 September 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp921.731.000 dan Rp921.731.000.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	**921.731.000**
Mutasi Tambah	**0**
Mutasi Kurang	**0**
Reklasifikasi keluar	**0**
Saldo per 30 Juni 2021	**921.731.000**
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	**(193.187.038)**
Nilai Buku 30 Juni 2021	**723.543.962**

Rincian asset Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya: Rp. 12.330.462

C.9. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 September 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp12.330.462 dan Rp12.140.462.

Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Negeri Serang berupa monografi. Jumlah monografi yang dimiliki Pengadilan Negeri Serang sebanyak 55 buah. Monografi tersebut keseluruhannya merupakan transfer masuk aset tetap lainnya yang berasal dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	12.140.462
Mutasi Tambah	**190.000**
Mutasi Kurang	**0**
Saldo per 30 September 2021	**12.330.462**
Akumulasi Penyusutan sd. 30 September 2021	**12.330.462**
Nilai Buku 30 September 2021	**0**

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp. [9.687.552.973)

C.10. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp(9.687.552.973) dan Rp(8.943.855.517).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu asset tetap yang disusutkan selama masa manfaat asset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	8.443.050.433	(6.913.093.441)	1.529.256.992
2	Gedung dan Bangunan	27.993.802.235	(2.581.272.494)	25.412.529.741
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	921.731.000	(193.187.038)	728.543.962
	Jumlah	36.780.739.368	(9.687.522.973)	27.671.060.695

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2021 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini

Aset Tak Berwujud: Rp4.994.000

C.11. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 30 September 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp4.994.000 dan Rp4.994.000.

Asset Tak Berwujud merupakan asset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, akan tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Asset tak berwujud pada Pengadilan Negeri Serang berupa software windows server dan aplikasi Sistem Administrasi Perkara Pengadilan Negeri yang digunakan untuk mengolah dokumen - dokumen perkara.

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	4.994.000
Mutasi Tambah	0
Pembelian Anti Virus	0
Mutasi Kurang	0
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 30 Juni 2021	4.994.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2021	(4.994.000)
Nilai Buku 30 Juni 2021	0

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 September 2021 adalah sebagai berikut :

Uraian	Nilai Perolehan
Anti Virus	4.994.000
Jumlah	**4.994.000**

Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Tetap Lainnya: (Rp4.994.000.)

C.12. Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Tetap Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Tetap Lainnya per 30 September 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar (Rp4.994.000) dan (Rp4.994.000). Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset Tetap Lainnya merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap lainnya yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Uang Muka dari KPPN: Rp42.000.000

C.13. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp42.000.000 dan Rp.0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Utang kepada pihak ketiga: Rp.0

C.14. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai utang kepada Phak Ketiga per 30 September 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp50.066.711. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Utang kepada Pihak Ketiga Pengadilan Negeri Serang berupa beban langganan daya dan jasa bulan Desember 2020 dan kekurangan belanja pegawai kenaikan gaji berkala dan kekurangan tunjangan uang makan Desember 2020.

Pendapatan diterima dimuka Rp0

C.15.Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 30 September 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing Rp0 dan Rp2.083.833. Pendapatan Diterima Dimuka yang dicatat per 31 Desember 2020 berupa pendapatan sewa gedung dan bangunan yang diterima Pengadilan Negeri Serang dari Bank Tabungan Negara untuk Payment Point pada Pengadilan Negeri Serang selama 2 tahun 2019 mulai bulan Februari 2019 hingga Februari 2021.

C.16. Ekuitas

Ekuitas: Rp 53719.838.342

Ekuitas per 30 September 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp53.719.838.342 dan Rp53.430.127.969. Ekuitas per 30 September 2021 mengalami peningkatan sebesar 289.710.373 atau 0,54 persen dibandingkan dengan nilai ekuitas di periode awal tahun. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNbp : Rp46.316.753

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp46.316.753 dan Rp38.889.465. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2021 dan 2020

Uraian	TH.2021	TH.2020	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	**46.316.753**	**38.889.465**	**19,09**
Total Pendapatan	**46.316.753**	**38.889.465**	**19,09**

Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan berasal dari pendapatan sewa rumah dinas.

Pendapatan LO PNBP tidak terdampak pandemi COVID 19 hal ini dikarenakan sumber PNBP pada Pengadilan Negeri Serang bersumber dari pendapatan sewa rumah dinas yang diperuntukkan bagi hakim yang pemungutan dan penyetoran PNBP ke kas Negara melalui potongan SPM Gaji Induk. Terdapat penurunan penerimaan sewa rumah dinas pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan penerimaan tahun lalu pada periode pelaporan yang sama dikarenakan tahun lalu adanya penerimaan kembali persekot/uang muka gaji.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp. 11.038.836.679

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11.038.836.679 dan Rp11.335.424.837. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 30 September TA 2021 dan TA 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	3.181.328.600	3.400.886.520	(1,46)
Beban Pembulatan Gaji PNS	39.166	45.313	(13,57)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	263.604.430	281.768.636	(6,45)
Beban Tunj. Anak PNS	83.570.318	92.817.344	(9,96)
Beban Tunj. Struktural PNS	32.940.000	44.820.000	(26,51)
Beban Tunj. Fungsional PNS	4.542.975.000	4.560.975.000	(0,39)
Beban Tunj. PPh PNS	603.135.083	585.986.090	(2,93)
Beban Tunj. Beras PNS	184.453.740	165.624.540	(11,37)
Beban Uang Makan PNS	416.006.000	462.257.000	(10,01)
Beban Tunjangan Umum PNS	17.785.000	15.245.000	(16,66)
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	1.713.000.000	1.725.000.000	(0,70)
Total Beban Pegawai	11.038.836.679	11.335.424.837	(2,62)

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp76.770.015

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp76.770.015 dan Rp72.606.500. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2021 dan TA 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	76.770.015	72.606.500	5,73
Total Beban Persediaan	**76.770.015**	**72.606.500**	**5,73**

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa : Rp1.130.998.709

Jumlah Beban Jasa per 30 September 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.130.998.709 dan Rp1.241.222.196. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan asset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya meningkatnya kebutuhan biaya operasional perkantoran, beban langganan listrik dan beban jasa lainnya. Rincian Beban Jasa untuk TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 September TA 2021 dan TA 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	**517.304.575**	**505.002.500**	**2,44**
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	**6.914.101**	**10.159.000**	**(31,94)**
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	**65.120.000**	**65.120.000**	**0,00**
Beban Barang Operasional Lainnya	**3.600.000**	**123.046.000**	**(97,07)**
Beban penanganan pandemi covid 19	**0**	**6.905.000**	**(100)**
Beban Langganan Listrik	**229.639.092**	**238.504.023**	**(3,72)**
Beban Langganan Telepon	**5.988.441**	**12.405.673**	**(51,73)**
Beban Sewa	**225.540.000**	**280.080.000**	**(19,47)**
Total Beban Barang dan Jasa	**1.130.998.709**	**1.241.222.196**	**5,74**

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp484.990.315

Beban Pemeliharaan per 30 September 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp484.990.315 dan Rp731.103.820. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Peningkatan beban pemeliharaan karena adanya kenaikan pada pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya. Rincian beban pemeliharan untuk TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 September TA 2021 dan TA 2021

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	175.981.175	390.274.068	(54,91)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	39.918.575	83.067.000	(51,94)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	242.070.565	232.749.752	4,00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	27.020.000	25.013.000	8,00
Total Beban Pemeliharaan	484.990.315	731.103.820	(33,66)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp6.110.000

Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.110.000 dan Rp21.700.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang perpindahan dari gedung lama ke gedung baru. Rincian Beban Perjalanan untuk TA 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 September TA 2021 dan TA 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	5.960.000	19.900.000	(70,05)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	150.000	1.800.000	(91,67)
Total Beban Perjalanan Dinas	6.110.000	21.700.000	(71,84)

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp743.697.456

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 September TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp743.697.456 dan Rp779.030.958. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni TA 2021 dan 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	460.813.798	471.165.827	(2,20)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	266.377.145	290.734.368	(8,38)
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	16.506.513	16.506.513	0
Beban Amortisasi Software	0	624.250	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	743.697.456	779.030.958	(6,48)

Terkait dengan penanganan pandemi COVID 19 pada Pengadilan Negeri Serang belanja dalam rangka penanganan pandemi COVID 19 yang direalisasikan adalah pembelian persediaan berupa :

1. Handsanitizer sebanyak 65 botol @500 ml.
2. Handsanitizer sebanyak 6 botol @1.000 ml.
3. Masker sebanyak 500 buah.

D.8. Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional : Rp0

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 September 2021 dan 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik(Turun) %
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	253.007.112	(100)
Beban Kegiatan Non Operasioanl Lainnya	0	230.500	(100)
Surplus (deficit) Kegiatan Non Operasional	0	253.007.112	(100)

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Rp53.430.129.969

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan per 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp53.430.129.969 dan Rp54.318.928.651.

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : (Rp13.435.086.421)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp13.435.086.421) dan (Rp13.886.525.234). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi: Rp0

Koreksi Nilai Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai asset tetap dan asset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Koreksi Antar Entitas : Rp13.724.796.794

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp13.724.796.794 dan Rp13.628.623.206 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Pengadilan Negeri Serang dalam rangka penanganan pandemi COVID 19 tidak memperoleh barang yang bersumber dari transfer masuk dari satuan kerja lain. Penanganan pandemi COVID 19 pada Pengadilan Negeri Serang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2021 Pengadilan Negeri Serang sendiri.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	13.468.139.714
Diterima Dari Entitas Lain	(44.232.920)
Transfer Masuk	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Transfer Keluar	0
Jumlah	**13.724.796.794**

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 30 September 2021, DDEL sebesar Rp44.232.920 sedangkan DKEL sebesar (Rp13.468.139.714).

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Rp53.719.838.342

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 September 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp53.719.838.342 dan Rp54.061.026.623

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK baik di Tahun Anggaran 2021 maupun Tahun Anggaran sebelumnya.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual dapat dijelaskan pada laporan keuangan tahunan.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Serang adalah :

- BRI Cabang Serang A/C 6532409756001000 a.n. BPG 020 Pengadilan Negeri Serang 097560 yang digunakan sebagai penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 September 2021 sebesar Rp0.
- BRI Cabang Serang A/C 654440990741000 a.n. BPG 020 Pengadilan Negeri Serang 099074 yang digunakan sebagai penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 30 September 2021 sebesar Rp0.
- BTN Cabang Cilegon A/C 0004701300007067 a.n. RPL 020 PDT UTK BIAYA PERKARA DAN TITIPAN yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara / Titipan Pihak Ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 September 2021 sebesar Rp.42.569.794.755.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

No.	Revisi DIPA	Tanggal Revisi	Uraian
1.	Revisi ke 01	9 Februari 2021	Perubahan Halaman III DIPA
2.	Revisi ke 02	15 April 2021	Perubahan Halaman III DIPA
3.	Revisi ke 03	12 Juli 2021	Perubahan Halaman III DIPA

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak terdapat ralat SPM dan tidak terdapat ralat SSBP dan SSPB sampai dengan 30 September TA 2021, sehingga tidak dapat menjabarkan terkait hal tersebut diatas.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak terdapat catatan penting lainnya yang perlu dijelaskan dalam laporan keuangan Triwulan III tahun 2021.

LAPORAN PENDUKUNG

A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN, AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN NILAI BUKU ASET TETAP

Pengadilan Negeri Serang
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir pada 30 September 2021

Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan sd. Periode ini	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan 30-06-2021	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin						
Alat Bantu	7	182.050.300	119.582.235	13.003.593	132.585.828	49.464.472
Alat Angkutan Darat Bermotor	7	714.093.532	714.093.532	0	714.093.532	0
Alat Angkutan Darat tak Bermotor	4	7.150.000	7.150.000	0	7.150.000	0
Alat Kantor	5	1.207.850.247	963.262.002	55.002.945	1.018.264.947	189.585.300
Alat Rumah Tangga	5	4.383.805.122	3.390.491.198	263.246.854	3.653.738.052	730.067.070
Alat Studio	5	91.999.132	53.565.826	6.701.706	60.267.532	31.731.600
Alat Komunikasi	5	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	0
Komputer Unit	4	1.345.565.900	890.079.900	88.251.200	978.331.100	367.234.800
Peralatan Komputer	4	501.836.200	305.054.950	34.607.500	339.662.450	162.173.750
Jumlah		8.443.350.433	6.452.279.643	460.813.798	6.913.093.441	1.530.256.992
Gedung dan Bangunan						
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	26.248.323.668	2.150.320.397	239.060.835	2.289.381.232	23.858.942.436
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	1.622.357.000	152.262.793	26.085.094	178.347.887	1.444.009.113
Tugu atau tanda batas	50	123.121.567	12.312.159	1.231.216	13.543.375	109.578.192
Jumlah		27.993.802.235	2.314.895.349	266.377.145	2.581.272.494	25.412.529.741
Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
Instalasi Gardu Listrik	40	560.219.000	87.339.775	7.002.738	94.342.513	465.876.487
Instalasi lain		56.970.000	51.273.000	5.697.000	56.970.000	0
Jaringan Listrik	40	304.542.000	38.067.750	3.806.775	41.874.525	262.667.475
Jumlah		921.731.000	176.680.525	16.506.513	198.187.038	728.543.962
Total		37.358.883.668	8.943.855.517	743.697.456	9.687.552.973	27.671.330.695

B. DAFTAR HIBAH LANGSUNG

PENGADILAN NEGERI SERANG
DAFTAR HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG / BARANG / JASA
PER 30 SEPTEMBER 2021

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Ket.
1	Bank Tabungan Negara	Barang	Hibah Langsung	300.700.000	300.700.000	-	-
						-	-
Jumlah		-	-	**300.700.000**	**300.700.000**	-	-